

KOORDINASI ANTAR INSTANSI PEMERINTAH DAERAH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN KOTA LANGSA BERWAWASAN LINGKUNGAN

Oleh :
Zulkarnainy ¹⁾
Matius Bangun ²⁾
Universitas Darma Agung ^{1,2)}
E-mail:
mbresearch28@gmail.com ²⁾

ABSTRAK

Dampak lingkungan pembangunan khususnya pembangunan industri yang tidak terdendali akan menyebabkan penurunan pada berbagai indikator pencemaran tidak hanya di darat tapi juga di perairan dan udara. Pembuangan limbah, suara pabrik pabrik dan asap yang dihasilkan, padatnya lalu lintas menimbulkan populasi udara dan kesemrawutan lalu lintas serta berbagai benturan sosial lainnya. Tujuan penelitian adalah Menganalisis koordinasi yang di lakukan antar instansi pemerintah dalam melaksanakan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan Mempelajari dan Menganalisis partisipasi masyarakat terhadap pembangunan kota Langsa yang berwawasan lingkungan. Metode penelitian ini adalah Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Hasil penelitian ini adalah Koordinasi yang di lakukan antar instansi pemerintah dalam mewujudkan Kota Langsa yang berwawasan lingkungan sudah berjalan dengan baik dibawah kepemimpinan Walikota. Partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pembangunan Kota Langsa yang Berwawacan Lingkungan dilakukan dalam bentuk non-fisik yaitu Voice (menyampaikan pesan), Akses (jaringan ke pemerintah daerah dan Control (pengawasan lapangan). Sedangkan partisipasi masyarakat secara Fisik adalah Menyediakan Waktu, Tenaga, Ketrampilan dan Matrial / Barang.

Kata Kunci : Instansi Pemerintah Daerah, Partisipasi Masyarakat, Mewujudkan Pembangunan Kota Langsa Berwawasan Lingkungan

PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan proses perubahan menuju sesuatu kondisi yang lebih baik dari keadaan sebelumnya. Pembangunan yang dilakukannya seyogyanya memperhatikan hal-hal dalam setiap prosesnya. Tak dapat di pungkiri dalam proses tersebut dampak dampak yang negatif yang merugikan sector sector yang lain. Dalam hal ini timbul pertanyaan pertanyaan bagaimana meminimalkan dampak negative dengan tetap mengoptimalkan dampak positif (manfaat).

Apabila dalam pelaksanaan pembangunan, terdapat aspek-aspek yang merasa dirugikan maka yang

menjadi pertanyaan apakah pembangunan benar-benar membawa perubahan menuju ke arah yang lebih baik atau perubahan lebih baik yang dihasilkan oleh pembangunan juga dapat memberikan resiko yang dapat merugikan.

Suatu daerah baik wilayah yang besar maupun dalam lingkungan yang lebih kecil seperti Kota Langsa merupakan pusat pemukiman penduduk yang melibatkan berbagai kegiatan seperti sosial budaya, ekonomi, industri politik dan lain sebagainya. Berdasarkan berbagai kegiatan / aktivitas tersebut tentu akan banyak menimbulkan ketimpangan antar sektor

maupun kesenjangan antar berbagai kelompok / golongan masyarakat.

Dampak lingkungan pembangunan khususnya pembangunan industri yang tidak terdendali akan menyebabkan penurunan pada berbagai indikator pencemaran tidak hanya di darat tapi juga di perairan dan udara. Pembuangan limbah, suara pabrik dan asap yang dihasilkan, padatnya lalu lintas menimbulkan populasi udara dan kesemrawutan lalu lintas serta berbagai benturan sosial lainnya.

Sehubungan dengan dampak yang ditimbulkan tersebut agar dapat diminimalisasi diperlukan suatu pengaturan lingkungan perkotaan menjadi pedoman dasar penataan lingkungan hidup khususnya di perkotaan dalam mengatasi berbagai permasalahan lingkungan hidup. Beberapa aspek sektoral yang penting sehingga perlu diatur dalam undang-undang tersendiri yang memuat misalnya sumber daya alam hayati, ekosistem, sumber daya alam buatan, cagar budaya, perindustrian, kesehatan, tata ruang, kependudukan dan sebagainya. Karena luasnya cakupan tersebut, pengelolaan lingkungan hidup di perkotaan sudah termasuk di dalamnya.

Pembangunan perkotaan yang berwawasan lingkungan ialah konsep yang ditempuh melalui proses jangka panjang, karena kota merupakan arena kegiatan manusia yang kompleks melibatkan berbagai aktifitas baik sumber daya manusianya maupun sumber daya alam dan sumberdaya buatan manusia. Pembangunan berwawasan lingkungan adalah upaya sadar dan berencana menggunakan dan mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Koordinasi

Pearce II dan Robinson *dalam* (Silalahi, 2013) mengatakan bahwa yang dimaksud dengan koordinasi adalah integrasi dari kegiatan-kegiatan individual dan unit-unit ke dalam satu usaha bersama yaitu bekerja ke arah tujuan bersama. Sedangkan menurut Stoner *dalam* Sugandha (2011:212) menambahkan bahwa koordinasi adalah proses penyatupaduan sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan dari unit-unit yang terpisah (bagian atau bidang fungsional) dari sesuatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien.

Dalam sebuah organisasi organisasi pemerintah maupun swasta bahwa setiap pimpinan perlu untuk mengkoordinasikan kegiatan kepada anggota organisasi yang diberikan dalam menyelesaikan tugas tugas yang menjadi pekerjaannya. Dengan adanya penyampaian informasi yang jelas, pengkomunikasian yang tepat, dan pembagian pekerjaan kepada para bawahan oleh manajer maka setiap individu bawahan akan mengerjakannya sesuai dengan wewenang yang diterima. Tanpa adanya koordinasi setiap pekerjaan dari individu karyawan maka tujuan perusahaan tidak akan tercapai.

2.1.1 Kesatuan Tindakan

Pada hakekatnya koordinasi memerlukan kesadaran setiap anggota organisasi atau satuan organisasi untuk saling menyesuaikan diri atau tugasnya dengan anggota atau satuan organisasi lainnya agar anggota atau satuan organisasi tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri. Oleh sebab itu konsep kesatuan tindakan adalah inti dari pada koordinasi. Kesatuan dari pada usaha, berartibahwa pemimpin harus mengatur sedemikian rupa usaha-usaha dari pada tiap kegiatan individu sehingga terdapat adanya keserasian di dalam mencapai hasil.

Kesatuan tindakan ini adalah merupakan suatu kewajiban dari pimpinan untuk memperoleh suatu koordinasi yang baik dengan mengatur jadwal waktu dimaksudkan bahwa kesatuan usaha itu dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

2.1.2 Komunikasi

Komunikasi tidak dapat dipisahkan dari koordinasi, karena komunikasi, sejumlah unit dalam organisasi akan dapat dikoordinasikan berdasarkan rentang dimana sebagian besar ditentukan oleh adanya komunikasi. Komunikasi merupakan salah satu dari sekian banyak kebutuhan manusia dalam menjalani hidup dan kehidupannya. “Perkataan komunikasi berasal dari perkataan *communicare*, yaitu yang dalam bahasa latin mempunyai arti berpartisipasi ataupun memberitahukan”. Dalam organisasi komunikasi sangat penting karena dengan komunikasi partisipasi anggota akan semakin tinggi dan pimpinan memberitahukan tugas kepada karyawan harus dengan komunikasi. Dengan demikian komunikasi merupakan hubungan antara komunikator dengan komunikan dimana keduanya mempunyai peranan dalam menciptakan komunikasi. Dari pengertian komunikasi sebagaimana disebut di atas terlihat bahwa komunikasi itu mengandung arti komunikasi yang bertujuan merubah tingkah laku manusia. Karena sesuai dengan pengertian dari ilmu komunikasi, yaitu suatu upaya yang sistematis untuk merumuskan secara tegas azas-azas, dan atas dasar azas-azas tersebut disampaikan informasi serta dibentuk pendapat dan sikap.

2.1.3 Pembagian Tugas

Secara teoritis tujuan dalam suatu organisasi adalah untuk mencapai tujuan bersama dimana individu tidak dapat mencapainya sendiri. Kelompok

dua atau lebih orang yang berkeja bersama secara kooperatif dan terorganisasi dapat mencapai hasil lebih daripada dilakukan perseorangan. Dalam suatu organisasi, tiang dasarnya adalah prinsip pembagian kerja. Prinsip pembagian kerja ini adalah maksudnya jika suatu organisasi diharapkan untuk dapat berhasil dengan baik dalam usaha mencapai tujuannya, maka hendaknya lakukan pembagian kerja. Dengan pembagian kerja ini diharapkan dapat berfungsi dalam usaha mewujudkan tujuan suatu organisasi.

Pembagian kerja adalah perincian tugas dan pekerjaan agar setiap individu dalam organisasi bertanggung jawab untuk melaksanakan sekumpulan kegiatan yang terbatas. Jadi pembagian kerja pekerjaan menyebabkan kenaikan efektifitas secara dramatis, karena tidak seorang pun secara fisik mampu melaksanakan keseluruhan aktifitas dalam tugas-tugas yang paling rumit dan tidak seorang pun juga memiliki semua keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan berbagai tugas.

2.1.4 Disiplin

Pada setiap organisasi yang kompleks, setiap bagian harus bekerja secara terkoordinasi, agar masing-masing dapat menghasilkan hasil yang diharapkan. Jadi jelasnya bahwa disiplin menyangkut pada suatu sikap dan tingkah laku, apakah itu perorangan atau kelompok yang untuk tunduk dan patuh terhadap peraturan suatu organisasi.

Pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya koordinasi yang baik, dapat mendorong terjadinya inisiatif dan respons, sehingga akan berdampak pada peningkatan kinerja pegawai dalam memberikan yang terbaik dalam penyelesaian pekerjaan.

2.2 Partisipasi

Fasli Djalal dan Dedi Supriadi (2001:201-202) partisipasi adalah sebagai suatu keterlibatan mental dan emosional dalam situasi kelompok yang mendorongnya memberi sumbangan terhadap tujuan kelompok serta membagi tanggungjawab bersama mereka. Pengertian sederhana tentang partisipasi adalah dimana partisipasi dapat juga berarti bahwa pembuatan keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa. Partisipasi dapat juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan masalahnya.

2.3 Pembangunan Berwawasan Lingkungan

Pembangunan merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Pembangunan merupakan proses pengolahan sumber daya alam dan pendayagunaan sumber daya manusia dengan memanfaatkan teknologi. Perlu perencanaan yang sangat matang dan terpadu dengan memperhatikan segala sudut pandang serta persepsi yang saling mempengaruhi dalam melaksanakan pembangunan tersebut

Pembangunan berwawasan lingkungan adalah konsep yang mampu mengurangi tingkat polusi di kota dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang melibatkan sumber daya alam secara optimal dengan sehingga alam mampu menopang segala aktivitas manusia secara seimbang. Pembangunan berwawasan lingkungan sangat penting untuk diterapkan diberbagai tempat mengingat kondisi alam saat ini sangat membahayakan dengan fenomena seringnya terjadi bencana alam yang sangat merugikan manusia.

2.4 Analisis Dampak Lingkungan

Analisis Dampak Lingkungan adalah untuk menentukan potensi dampak lingkungan, sosial, dan kesehatan dari suatu kegiatan pembangunan yang diusulkan atau direncanakan. Dengan adanya Analisis Dampak Lingkungan maka otoritas dapat mengambil suatu tindakan untuk meminimalisasi dampak yang di timbulkan suatu kegiatan pembangunan.

Melalui Analisis Dampak Lingkungan pengambil kebijakan akan mengembangkan suatu kegiatan pembangunan dalam mengembangkan proyek dalam otorisasi proyek diinformasikan tentang kemungkinan konsekuensi dari suatu kebijakan / keputusan.

Amdal bukanlah suatu proses yang berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari proses Amdal yang lebih besar dan lebih penting sehingga Amdal merupakan bagian dari beberapa hak berikut :

- a. Pengelolaan Lingkungan. Dalam melakukan kegiatan pengelolaan lingkungan diperlukan adanya susunan rencana pengelolaan lingkungan. Susunan rencana pengelolaan lingkungan baru dapat dilakukan setelah diketahui dampak-dampak yang akan terjadi akibat proyek yang akan dilakukan. Di sinilah peranan penting AMDAL agar proyek pembangunan yang dilakukan tidak memberikan dampak buruk bagi lingkungan. Pengelolaan Proyek
- b. Dalam pengelolaan kegiatan pembangunan peranan AMDAL adalah terlebih dahulu melakukan fase-fase berikut : Fase Identifikasi, Fase studi kelayakan, Fase desain kerekayasa (engineering design) atau fase rancangan, Fase pembangunan proyek, Fase proyek berjalan atau fase proyek beroperasi, Fase proyek telah

- berhenti beroperasi atau pasca operasi (post operation)
- c. Pengambilan Keputusan. Dari hasil AMDAL, dapat diketahui apakah suatu aktivitas pembangunan akan berdampak baik atau buruk pada lingkungan. Pemerintah pun akan mengambil keputusan dari hasil AMDAL tersebut. Jika berdampak baik, maka pembangunan akan dilanjutkan secara berkesinambungan. Akan tetapi jika kegiatan pembangunan tersebut berdampak buruk pada lingkungan, maka kegiatan tersebut tidak akan dilakukan atau dilakukan alternatif-alternatif lain yang dapat menghilangkan atau meminimalisasi dampak negatif tersebut.
 - d. Dokumen yang Penting Laporan AMDAL merupakan dokumen penting yang merupakan sumber informasi yang sangat bermanfaat untuk berbagai keperluan :
 - Sebagai informasi pembandingan dalam hasil analisis
 - Sebagai sumber informasi yang penting untuk proyek yang akan dilakukan di daerah dekat lokasi tersebut.
 - Dokumen penting yang dapat digunakan di pengadilan dalam menghadapi tuntutan proyek lain, masyarakat atau instansi pengawas.
 - Secara umum, kegunaan AMDAL adalah :
 - Mencegah agar potensi sumberdaya alam yang dikelola tidak rusak.
 - Menghindari efek samping dari pengelolaan sumber daya alam.
 - Mencegah terjadinya perusakan lingkungan akibat pencemaran, sehingga tidak mengganggu kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan masyarakat. Mengetahui manfaat yang berdaya guna dan berhasil guna bagi bangsa, negara, dan masyarakat.

2.5 Rona Lingkungan

Rona Lingkungan merupakan kondisi lingkungan pada saat ini yaitu kondisi alam atau komponen-komponen lingkungan awal sebelum perencanaan dan pembangunan fisik dimulai. Rona lingkungan merupakan kondisi lingkungan awal sebelum tersentuh oleh kegiatan untuk keperluan perencanaan, konstruksi (pembangunan fisik) dan kegiatan operasi. Hal-hal yang termuat didalam rona lingkungan, yaitu:

- a. Biogeofisik Kimia, meliputi : komponen-komponen lingkungan tersebut diketahui dengan melakukan survei lapangan, yaitu dengan suatu strategi pengambilan sampling yang tepat, kemudian dianalisa sesuai dengan komponen lingkungan masing-masing
- b. Sosial Budaya dan Ekonomi, meliputi : komponen lingkungan ini didapat dengan melakukan penyebaran questioner, wawancara langsung kepada masyarakat, pemuka setempat dan data sekunder pada beberapa desa dan kecamatan di sekitar lokasi proyek. Dari data survey lapangan, data sekunder dan hasil analisis laboratorium pada masing-masing komponen lingkungan akan didapat kondisi lingkungan pada saat itu atau sebelum proyek didirikan (Rona Lingkungan).

METODE PENELITIAN

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat utama penelitian ini dilakukan di Kota Langsa khususnya instansi yang berhubungan dengan Lingkungan Hidup. Sedangkan tempat untuk wawancara disesuaikan dengan tempat Informan Kunci maupun Informan pendukung yang berada saat penelitian di lakukan. Adapun waktu penelitian bulan Oktober 2022 sampai Nopember 2022.

3.2. Metode Penelitian

David H. Penny *dalam* Akhmadi, 2009 : mengatakan bahwa pada dasarnya penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan informasi dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian merupakan berfikir ilmiah yaitu berfikir yang logis dan empiris. Logis: masuk akal, empiris: dibahas secara mendalam berdasarkan fakta yang dapat dipertanggung jawabkan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Hardiansyah, 2010:9). Metode Penelitian Kualitatif Dikanjutkan oleh Lexy J. Moleong dalam bukunya (2004:6), mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Sedangkan menurut Bogdan dan Taylor *dalam* Moleong, (2007:3) mengemukakan bahwa metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Proses penelitian Kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para informan/partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data. Metode penelitian Kualitatif dengan sumber

data primer melalui wawancara dengan Informan Kunci yaitu yang berhubungan dengan koordinasi antara instansi tentang Pembangunan Berwawasan Lingkungan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Keadaan Daerah Penelitian

Langsa adalah salah satu [Kota](#) yang berada di Provinsi [Aceh](#), [Indonesia](#). Kota Langsa berada kurang lebih 400 km dari [kota Banda Aceh](#). Pada tahun [2021](#), jumlah penduduk kota Langsa sebanyak 185.622 jiwa, dengan kepadatan 707 jiwa/km. Kota Langsa yang menjadi objek dalam penelitian ini memiliki perkembangan yang sangat cepat dibanding Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Aceh. Perkembangan ini ditunjukkan dengan pertumbuhan usaha baru yang didukung dengan kebijakan dan arah pembangunan kota yang jelas. Bukan hanya dunia usaha, pertumbuhan kompleks perumahan dan hunian baru juga mengalami pertumbuhan yang cepat sesuai dengan pertumbuhan kehidupan ekonomi.

Pertumbuhan kedua aspek ini membutuhkan lahan dan mendukung perubahan lingkungan hidup di Kota Langsa yang jika tidak dikendalikan akan berdampak terhadap pertumbuhan perkotaan yang negative seperti perumahan kumuh dan lain sejenisnya. Untuk mengatasi hal ini Pemerintah Kota Langsa merumuskan berbagai kebijakan lingkungan menyeluruh agar tercipta lingkungan hidup yang sehat dan memenuhi indikator lingkungan hidup.

Luas wilayah Kota Langsa adalah 190.735 Ha yang terdiri dari Kecamatan dan 66 Gampong (Desa). Dengan wilayah seluas ini pemantauan kualitas lingkungan hidup mempunyai tantangan tersendiri. Pemantauan kualitas lingkungan hidup seperti Uji Kualitas Air Sungai dan Uji Kualitas Udara belum dapat

dilakukan sendiri karena belum tersedia personil yang dapat mengelola Laboratorium Lingkungan. Uji Laboratorium dilaksanakan bekerja sama dengan Laboratorium Analisis Instrumentasi Kimia Darussalam Banda Aceh Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.

4.3 Ekonomi

Secara umum struktur perekonomian Kota Langsa didominasi oleh kategori Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Pada penghitungan PDRB dengan metode lama, sektor jasa-jasa merupakan salah satu sektor dominan di Kota namun pada penghitungan PDRB kali ini diklasifikasikan menjadi beberapa kategori menurut fungsi sehingga jasa-jasa terbagi menjadi kategori jasa administrasi pemerintahan, jasa pendidikan, jasa kesehatan, dan jasa lainnya. Sejak beberapa tahun terakhir, mulai terjadi pergeseran struktur ekonomi di Kota Langsa. Kontribusi kategori pertanian tidak lagi mendominasi terhadap perekonomian Kota Langsa. Kondisi daerah perkotaan seperti yang terjadi di Kota Langsa cenderung menitikberatkan perekonomian pada kategori non pertanian. Hal ini sesuai dengan wilayah yang berstatus kota yang perekonomiannya bertumpu pada kategori non pertanian.

4.4 Sosial Budaya

Terciptanya sosial budaya dimasyarakat dikarenakan peran interaksi antara manusia dengan alam sekitarnya. Dari interaksi yang saling berhubungan tersebut maka terciptalah kebudayaan yang menyangkut kehidupan dan kebiasaan dari masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Melestarikan dan

mempertahankan suatu kebudayaan merupakan upaya yang dapat dilakukan untuk mendalami atau memahami Nilai-nilai kebudayaan yang tidak terlepas dari peran masyarakat khususnya pemuda sebagai peran utama di era globalisasi. Untuk tetap menjaga prestasi di bidang kepemudaan dan olahraga, Pemerintah Kota Langsa melalui perangkat daerah terkait berupaya tetap melakukan program peningkatan peran serta kepemudaan melalui kegiatan pembinaan organisasi kepemudaan di wilayah Kota Langsa. Kegiatan ini tentu saja bertujuan untuk menjadikan pemuda-pemuda yang ada di Kota Langsa menjadi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cerdas, kreatif, inovatif dan mandiri.

4.5 Permasalahan Lingkungan

Pembangunan yang berwawasan lingkungan adalah upaya sadar dan berencana menggunakan dan mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang terencana dan berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup. Adapun tujuan dari terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan tersebut adalah terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah B3 adalah sisa suatu usaha yang mengandung bahan berbahaya dan bahan beracun karena sifat atau konsentrasinya atau jumlahnya dapat mencemari atau merusak lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia atau makhluk hidup lainnya. Limbah B3 harus ditangani dengan perlakuan khusus mengingat bahaya dan resiko

yang mungkin ditimbulkan apabila limbah ini menyebar kelingkungan. Pengelolaan Limbah B3 meliputi penyimpanan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan. Sumber Limbah B3 bukan hanya dari industri, tetapi kegiatan rumah tanggupun sangat potensial menghasilkan Limbah B3.

Wawancara **Wawancara Pertama dengan Ridwanullah SSTP, MSP** selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa pada hari Rabu tanggal 3 Nopember 2022 Dari Tahun 2017 sampai Tahun 2020 Dinas Lingkungan Hidup telah mengeluarkan Izin Pengelolaan Air Limbah (Izin IPAL) dan Izin Tempat Penampungan Sementara (TPS) Limbah B3 untuk 3 (tiga) Rumah Sakit yang ada di Kota Langsa dan 1 (satu) Izin TPS Limbah B3 untuk Pabrik Kelapa Sawit Timbang Langsa. Untuk proses pengangkutan Limbah B3 baik Rumah Sakit dan Pabrik Kelapa Sawit melakukan kerjasama dengan Transporter.

Permasalahan yang terkait dengan lingkungan hidup yang menjadi daftar panjang isu lingkungan hidup antara lain :

- Pengintegrasian dan pengembangan pusat kegiatan diluar kawasan bencana;
- Pengelolaan kawasan rawan bencana alam dan kawasan lindung geologi;
- Pemeliharaan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- Pengembangan kawasan pertanian dalam rangka keamanan dan ketahanan pangan;
- Pengembangan kawasan pariwisata terintegrasi;
- Pengembangan kawasan pendidikan;
- Pengembangan industri menengah, kecil dan mikro yang ramah lingkungan;
- Pengembangan kawasan pemukiman yang aman, nyaman dan berwawasan lingkungan.

- Pemantapan sarana wilayah.
- Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Pada **Wawancara Kedua dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup** tersebut pada hari Senin tanggal 7 Nopember 2022 berbagai kegiatan yang difokuskan sesuai dengan situasi dan perkembangan pada saat tersebut yaitu sebagai berikut :

Tabel 6. Fokus Kegiatan yang berkaitan dengan Lingkungan Hidup, 2022

No.	Folus Kegiatan	Sasaran Kegiatan
1.	Penanganan Covid -19	Penanganan penderita Civod-19
2.	Penyakit dan Kesehatan Masyarakat.	Khususnya yang Terdampak Covid - 19
3.	Pengelolaan Sampah	Di lokasi pemukiman dan TPA

Sumber : Rekapitulasi hasil Wawancara dengan Informan, 2023

a) Penanganan Limbah B3

Salah satu permasalahan dalam pembangunan Kota Langsa adalah penangan Limbah B3. Wasil **Wawancara Ke-Enam dengan Ridwanullah SSTP MSP** selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup pada hari Senin Tanggal 21 Nopember 2022 mengatakan bahwa mengingat dampak limbah B3 sangat berbahaya bagi manusia dan lingkungan, maka diperlukan pengelolaan yang baik dan benar. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan perizinan pengelolaan di bidang Limbah B3. Berdasarkan kewenangan, Kota Langsa mempunyai kewenangan memberikan izin pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan sementara Limbah B3. Sejak tahun

2017 Dinas Lingkungan Hidup telah mengeluarkan izin yang berkaitan dengan Limbah B3 yaitu Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 untuk kegiatan Rumah Sakit dan Pabrik Kelapa Sawit.

Kepala Dinas menambahkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup melakukan pengawasan terhadap kegiatan penyimpanan sementara dan pengangkutan Limbah B3 untuk memastikan kegiatan pengangkutan berjalan sesuai MoU antara pihak penghasil limbah dengan pihak pengangkut (Transporter).

Bentuk control tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 11. Bentuk Kontrol dari Masyarakat, 2022

No.	Bentuk Kontrol	Keterangan
1.	Teguran	<ul style="list-style-type: none"> • Coretan dinding di jalan umum • Coretang di tiang lampo penerangan
2.	Laporan	<ul style="list-style-type: none"> • Merusak bungs / taman kota • Membuang sampah sembarangan

Sumber : Hasil wawancara dengan Informan Kunci, 2022

Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat secara lebih aktif lagi dalam mewujudkan pembangunan Kota Langsa berwawasan Lingkungan dari hasil **Wawancara ke Sembilan Belas** dengan **Muhammad Darfian, ST** selaku Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Kota Langsa menjelaskan berbagai upaya tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

Tabel 12. Upaya Pemko Langsa meningkatkan Partisipasi

Masyarakat, 2022.

No.	Upaya yang Dilakukan
1.	Reboisasi Di Kawasan Wisata RTH Manggrove
2.	Penanaman Pohon
3.	Budaya Gotong Royong

Sumber : Informan Kunci Ka, Bappeda Langsa, 2022

❖ Reboisasi Di Kawasan Wisata RTH Manggrove

Kawasan Wisata RTH Manggrove merupakan ekowisata alternatif lainnya yang sudah dikembangkan di Kota Langsa. Hutan mangrove yang pada dasarnya memiliki fungsi sebagai salah satu faktor yang dapat mengurangi resiko pemanasan global dan penyerap karbon, disamping itu juga membawa keindahan tersendiri untuk dijadikan destinasi wisata terbaik.

Pemerintah Kota Langsa bekerja sama dengan Direktorat Jenderal, Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PDASHL KLHK) menanam 5.000 pohon mangrove di Gampong Kuala Langsa, Kecamatan Langsa Barat. Kegiatan itu sebagai bentuk pengembangan ekowisata hutan mangrove yang menjadi salah satu obyek wisata paling diminati di Kota Langsa. Wali Kota Langsa menyebutkan pemerintahnya fokus mengembangkan ekowisata. Langsa memiliki lahan basah cukup luas, dengan 30 jenis bakau, ada juga fauna endemik seperti lumba lumba, burung dan monyet, ini menjadi karunia Allah SWT untuk wisata Langsa.

Pemerintah Kota Langsa berupaya menjalankan konsep konservasi berbasis kesejahteraan melalui pengembangan ekowisata hutan mangrove. Dengan begitu

diharapkan mangrove lestari, pendapatan masyarakat meningkat, lapangan kerja tercipta, dan kesejahteraan masyarakat semakin baik. Optimalisasi pemanfaatan bahan – bahan non kayu seperti membuat sirup mangrove, dodol mangrove dan sebagainya menjadi tujuan lainnya dari Pemerintah Kota.

❖ **Penanaman Pohon**

Visi menjadi Kota Hijau benar-benar menjadi dasar dalam pembangunan Kota Langsa yang berwawasan lingkungan. Visi ini diterapkan dalam segala aspek kehidupan di Kota Langsa melalui membudayakan menanam pohon yang melibatkan masyarakat dan komponen lainnya di Kota Langsa. Karena pembanguna.n Kota Langsa menjadi Kota hijau dibutuhkan keterlibatan semua pihak. Keterlibatan tersebut dimotivasi melalui kebijakan Walikota Langsa. Selain mengeluarkan kebijakan kepada seluruh pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Langsa, Walikota Langsa juga sudah melakukan kegiatan penanaman pohon secara rutin setiap jumat bersama dengan seluruh Forkompimda Kota Langsa.

❖ **Budaya Gotong Royong**

Budaya Gotong Royong sudah mulai memudar di Aceh khususnya Kota Langsa sejak masa konflik berakhir. Untuk membudayakan kembali Budaya Gotong Royong di masyarakat Walikota Langsa melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa menginisiasi terlaksananya kegiatan Gotong Royong bulanan di Kota Langsa. Kegiatan ini dilakukan oleh seluruh OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Langsa bersama-sama dengan masyarakat.

Kegiatan gotong royong dilakukan berpindah-pindah dari satu Gampong ke Gampong Lainnya setiap bulan. Kegiatan Gotong Royong yang dilakukan berpindah-pindah dimaksudkan kegiatan bisa menyatu dengan gotong royong di lingkungan gampong sehingga gotong royong tumbuh kembali sebagai budaya bersih di masyarakat Kota Langsa. Dengan demikian Pemerintah Kota Langsa tidak hanya membersihkan Kota Langsa tetapi menumbuhkan semangat gotong royong kembali menjadi budaya masyarakat Kota Langsa

SIMPULAN

Koordinasi yang di lakukan antar instansi pemerintah dalam mewujudkan Kota Langsa yang berwawasan lingkungan sudah berjalan dengan baik dibawah kepemimpinan Walikota. Partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pembangunan Kota Langsa yang Berwawacan Lingkungan dilakukan dalam bentuk non-fisik yaitu Voice (menyampaikan pesan), Akses (jaringan ke pemerintah daerah dan Control (pengawasan lapangan). Sedangkan partisipasi masyarakat secara Fisik adalah Menyediakan Waktu, Tenaga, Ketrampilan dan Matrial / Barang.

Saran

Pemerintah Daerah di bawah kepemimpinan Walikota agar senantiasa mengintensifkan peranan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dalam pelaksanaan tugas dan meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat sehingga memilik persepsi yang sama dalam Pembangunan Kota Langsa yang Berwawasan Lingkungan.

Meningkatkan sosialisasi kepada leompok kelompok masuarakat tentang Pembangunan Kota yang Berwawasan Lingkungan vaik secara langsung (sosialisas, Fokus Group Diskusi /

FGD) ataupun tidak langsung (melalui media cetak, media elektronik maupun media sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- A.D., Siti Irene, 2011.* Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2011).
- Burhan. 2010.* Metodologi Penelitian Kualitatif. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Djalal, Fasli dan Supriadi, Dedi. 2001.* Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah. Yogyakarta: Adicita.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2009.* Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Ina E Slamet, 2015.* Pokok-Pokok pembangunan masyarakat desa/Ina E. Slamet, Author: Publisher:Jakarta : Bhratara, Subject:Pembangunan masyarakat.
- Isbandi Rukminto. 2007.* Perencanaan Partisiporis Berbasis Aset. Komunitas. Dari Pemikiran Menuju Penerapan. Jakarta: PT Raja Grafindo. Persada.
- Jayadinata, Djohara, T, 1992.* Tata Guna Tanah Dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan, dan Wilayah. Bandung : ITB.
- Manullang, 2008,* Dasar-Dasar Manajemen, Yogyakarta: Ghalia Indonesia (GI)
- Mikkelsen, Britha. (1999).* Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan: sebuah buku pegangan bagi para praktisi lapangan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Moleong, Lexy J. 2011.* Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Rosda Karya.
- Sastropoetro, Santoso. R.A. 1988.* Partisipasi, Komunikasi, Persuasi Dan Disiplin Dalam Pembangunan Nasional. Bandung : Alumni
- S.P.Hasibuan, Malayu.2005.*Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah Bumi Jakarta : Aksara.

Jurnal-Jurnal :

Bripda Talenta (2020). Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus: Desa Firdaus Estate Kec. Sei Rampah, Kab. Serdang Bedagai Tahun 2019)

Dzati Utomo (2011), Analisis Pemnafaatan Ruang Yang Berwawasan Lingkungan Di Kawasan Pesisir Kota Tegal. Program Studi Ilmu Lingkungan Program Pasca Sarjana UNDIP JURNAL ILMU LINGKUNGAN Volume 9, Issue 2: 51-55 (2011) ISSN 1829-8907.

Firgie Ries Pratama (2021) Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Anggota badan Permusyawaratan Desa (BPD) (Studi Kasus Di Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima)

Hartanto, Asprila Bayu (2018) Strategi Pengembangan Ekowisata Berkelanjutan Pada Wilayah Konservasi Di Clungup Mangrove Conservation Dengan Pendekatan Co-Management, Sendangbiru, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Ike Setyaningrum. 2015. Karakteristik Peningkatan Pengelolaan Sampah Oleh Masyarakat Melalui Bank Sampah. Jurnal Teknik Pwk Volume 4 Nomor 2 2015

Lowinsky WP dkk (2018) dalam penelitiannya tentang Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Proses Legislasi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (Studi Di Desa Amongena Kecamatan Langowan Timur.

S.Katengar (2015). Analisis Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan (Suatu Studi di Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/view/7759>

Peraturan-Peraturan :

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa 2019.

Peraturan Daerah Karo Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 02 tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa,

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/52/SJ tanggal 5 Januari 2021